

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional, seperti terkandung dalam GBHN 1993, adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembanguan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjadinya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Dengan demikian pembangunan yang sudah memasuki PJP II ini tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja, tetapi merupakan usaha perubahan yang menekankan pada upaya mencari keseimbangan, keselarasan dan keserasian hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Keberhasilan pembangunan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari faktor pendukungnya, terutama manusia sebagai sumber daya pelaksananya. Oleh karena itu ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (Bintoro Tjokroamdjojo, 1986 : 1), bahwa "pembangunan itu harus dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep yang

statis". Dengan demikian dalam pembangunan ini diakui bahwa kedudukan, fungsi dan peranserta manusia sebagai sumber daya utama dan kunci keberhasilan pembangunan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Menteri Penerangan RI (Harmoko, 1986 : 83), bahwa : "Berhasilnya pembangunan masyarakat kita tergantung kepada peranserta (partisipasi aktif) seluruh rakyat, dan disiplin para penyelenggaranya".

Asumsi yang berkembang dalam melaksanakan pembangunan adalah bahwa yang penting bukan sekedar tercapainya sasaran pembangunan, tetapi lebih dari pada itu, yakni bagaimana proses untuk mencapai sasaran pembangunan itu diupayakan. Dengan demikian masyarakat menjadi sadar mengapa perlu membangun, selanjutnya ia merasakan bahwa pembangunan adalah bagian dari kehidupannya, miliknya dan menjadi kewajiban serta tanggung jawabnya pula.

Peranserta masyarakat dalam pembangunan ini merupakan kunci keberhasilan, terutama apabila mendapat dukungan dari para pemuka masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Muhtadi (1979 : 43), bahwa "pemuka masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap warga masyarakatnya, oleh karena itu perlu diikuti sertakan sebagai kader". Lebih lanjut dikemukakan oleh Muhtadi bahwa "sesuatu program pembangunan dari pemerintah

kadang-kadang dapat gagal karena tidak memperansertakan secara aktif para pemuka masyarakat". Hal yang senada dikemukakan pula oleh Rahayu Hanafiah (1976 : 1), bahwa: "... pembangunan berjalan lancar dan berhasil baik jika mendapat dukungan dari para pemuka masyarakat setempat, termasuk para pimpinan agamanya".

Pemuka masyarakat di dalam masyarakat Muslim adalah "ulama", yang termasuk di dalamnya khatib dan muballigh/muballighah. Ulama yaitu orang-orang yang ahli melaksanakan tugas menyebarkan dan mengamalkan agama Islam (Badri Sanusi, 1987 : 1).

Ulama merupakan sumber daya manusia yang potensial dalam pembangunan masyarakat. Para ulama secara kultur diakui, disegani dan dijadikan panutan masyarakat. Karena itu para ulama sangat strategis dijadikan sebagai kunci pembangunan masyarakat. Para ulama yang berperan sebagai khatib, muballigh / muballighah atau da'i, diharapkan dapat menunjang pembangunan masyarakat, baik yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri maupun berupa program yang disodorkan pemerintah.

Sebagai pemuka masyarakat, para ulama akan lebih berhasil dalam membawa ummatnya kepada tujuan yang diharapkan, sebagaimana dikemukakan oleh Badri Sanusi (1987 : 1), ialah jika ulama itu memiliki :

- (a) ilmu pengetahuan Islam yang luas dan menghayati kebijaksanaannya,
- (b) kemampuan menerjemahkan

nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat, (c) kemampuan menerjemahkan gagasan pembangunan sebagai realisasi Pancasila, kedalam bahasa yang dipahami oleh umat Islam, (d) kemampuan berperanserta secara aktif dalam usaha pembangunan bangsa sebagai pelaksana firman Allah SWT dalam Al Quran dan realisasi Pancasila, (e) kemampuan memberikan pendapat, saran-saran dan petunjuk terhadap ide dan cara-cara yang dilakukan untuk suksesnya pembangunan nasional.

Lain halnya dengan kenyataan di masyarakat, bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, rata-rata berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini adalah sebagai produk lembaga-lembaga pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, termasuk lembaga pendidikan keagamaan. Rendahnya tingkat pendidikan ini akan membawa pengaruh yang kurang baik terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam pembangunan nasional. Hal itu banyak dilontarkan oleh para ahli. Seperti dikemukakan oleh BAKOR Jawa Barat (1979), bahwa :

Dalam kehidupan di masyarakat, sebagian besar umat Islam di Indonesia belum benar-benar memahami ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh isolasi ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Islam masih terpecah-pecah kedalam golongan-golongan, yang menyebabkan orang Islam mengikuti ideologi bukan Islam, tidak senang kepada perkembangan Islam, dan takut akan perubahan serta gerak pembangunan masyarakat.

Alamsyah Ratu Prawiranegara (1986 : 42-43), juga mengemukakan hal yang senada, yaitu :

Dewasa ini Islam berada dalam keadaan kebodohan, kemunduran, serta keterbelakangan. Faham-faham bathil seperti : bid'ah dan kurafat menyelimuti umat

Islam. Ummat Islam sebagian besar kurang mengetahui tuntunan agama yang sesungguhnya. Kekurangan konsepsi metode dalam berbagai bidang seperti politik, sosial ekonomi, pendidikan dan teknologi.

Yang menyakitkan lagi seperti ditulis Donald K. Emmerson dengan nada "tendensius" ketika memperkenalkan Islam di Indonesia dewasa ini, bahwa umat Islam di Indonesia hanyalah minoritas yang aktif dalam mayoritas bilangan pada masyarakat yang majemuk di bawah pemerintah yang otoriter yang sedang melakukan pembangunan sekuler. Tulisnya : "In Indonesia, Islam is an active minority - within a numerical majority - inside a pluralistic society under an authoritarian government engaged in secular development". (M. Amin Rais, ed., 1992 : 41). Emmerson melihat umat Islam di Indonesia adalah mayoritas penduduk yang sangat heterogin. Sebagian besar dari mereka tidak tahu apa-apa tentang Islam, yang dikategorikan Clifford Geertz (1989 : 1) sebagai abangan dan priyayi.

Rendahnya tingkat pendidikan umat Islam tidak hanya dirasakan oleh anggota masyarakat sebagai orang awam saja, tetapi juga nampaknya melanda para pemuka agama itu sendiri, baik mutu maupun jumlahnya. Hal ini terungkap dalam beberapa penelitian yang berkaitan dengan kondisi para ulama di Indonesia. Hasil penelitian tersebut di antaranya dari Yayasan Pesantren Pertanian Darul Falah Bogor (1985 ; 8), yang mengemukakan

bahwa :

Dewasa ini umat Islam di pedesaan benar-benar kekurangan "imam" yang mampu membimbing rohani dan pemecahan masalah kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama dalam melaksanakan program-program pembangunan masyarakat, baik yang datang dari pemerintah maupun yang berasal dari masyarakat setempat.

Demikian juga hasil penelitian Pusat Latihan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (PLP2M, 1983) yang mengemukakan bahwa :

Dewasa ini terjadi krisis tenaga ulama Islam kualitas iman yang tinggi, intelektualitas yang tinggi, dan keterampilan yang mendasar, sehingga mampu sebagai kader pembangunan masyarakat. Ulama yang memiliki ilmu pengetahuan dari pesantren, setelah kembali ketempat asalnya, mereka tidak mau dan tidak mampu menjadi kader-kader pembangunan masyarakat.

Senada dengan kedua hasil penelitian tersebut di atas, Alamsyah Ratu Prawiranegara, melihat kelemahan-kelemahan para ulama di negeri kita. Ia mengemukakan (1986 : 50), bahwa :

Para pemuka agama (ulama) di masyarakat kita dewasa ini kurang lincah di dalam membaca situasi, sehingga kurang mampu mengambil inisiatif dan kurang berpikir secara strategis, sehingga kurang mampu membawa umat sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan sedikitnya para pemuka agama, padahal mereka merupakan sumber daya manusia potensial dan strategis dalam pembangunan umat. Menyadari akan keadaan tersebut maka pemerintah, masyarakat

maupun individu yang bersangkutan, yang kesemuanya bertanggung jawab terhadap pendidikan, berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tersebut. Dapat dijelaskan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah menerima gagasan baru, serta makin terbuka terhadap berbagai perubahan yang diperlukan demi masa depannya. Dalam hal ini David Krech (1962 : 79) menyatakan bahwa : "Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin berkembang kognisinya dan semakin sadar terhadap situasi sekitarnya".

Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia sehingga memiliki kemampuan yang tinggi dalam melahirkan aktivitas yang kreatif dan produktif. Pengembangan sumber daya manusia banyak dibebankan kepada usaha pendidikan, karena pendidikan nasional di Indonesia, berfungsi untuk "mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional" (UUSPN No. 2 Tahun 1989; pasal 3). Tujuan pendidikan nasional itu sendiri (UUSPN No. 2 Tahun 1989 pasal 4), adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang : (a) beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (b) berbudi pekerti luhur; (c) memiliki pengetahuan

dan keterampilan; (d) sehat jasmani dan rohaninya; (e) berkepribadian yang mantap dan mandiri; dan (f) memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut dilakukan melalui dua bentuk penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan sekolah mengutamakan penguasaan kemampuan umum yang transferable melalui proses mempelajari konsep-konsep yang esensial dari bidang studi. Isi, bahkan kajian ditata melalui pengembangan kurikulum yang agak kaku sehingga siswa cenderung memperoleh hasil belajar sebagaimana ditetapkan di dalamnya. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah tidak sekaku dan seterbatas pendidikan sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah, Bab IV pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa : "Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dapat terdiri atas pemerintah, badan, kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan".

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang berupaya untuk melayani kebutuhan belajar dibidang keagamaan (Agama Islam) sudah banyak dilakukan. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah pendidikan pondok pesantren, pesantren kilat, kursus, lokakarya, seminar dan

penataran.

Penelitian ini akan mencoba menganalisis penataran khatib dan muballigh/muballighah sebagai salah satu jenis pendidikan luar sekolah. Penataran khatib dan muballigh/muballighah, dilihat dari materi yang ditatar-kannya yaitu mengenai agama, maka penataran tersebut termasuk jenis pendidikan luar sekolah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah. Dalam Bab III, pasal 3 (1) PP No. 73 dikemukakan bahwa : "Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan". Selanjutnya dalam ayat 3 dikemukakan, bahwa : "Pendidikan keagamaan" merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan". Dengan demikian jelas bahwa penataran khatib dan muballigh/muballighah adalah jenis pendidikan luar sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Dengan bermunculannya upaya-upaya peningkatan dan pengadaan kader-kader pembangunan, khususnya untuk pemuka pemuka agama (ulama) sebagai sumber daya manusia yang potensial, seperti penataran, kursus dan sebagainya,

tidak mustahil penyelenggaraannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penataran khatib dan muballigh/muballighah adalah merupakan salah satu jenis pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu penyelenggaraannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan luar sekolah, baik sistem maupun manajemennya.

Atas dasar dugaan-dugaan tersebut di atas, maka timbul pertanyaan sebagai fokus penelitian ini, yaitu : "Apakah sistem dan manajemen penataran khatib dan muballigh/muballighah sesuai dengan sistem dan manajemen pendidikan luar sekolah" ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat cakupan masalah penataran khatib dan muballigh / muballighah ini cukup banyak dan cukup luas, maka untuk mendapatkan data penelitian yang lengkap dan mendalam, sesuai dengan karakteristik penelitian ini penulis merasa perlu untuk membatasi masalah. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada :

1. Penyelenggaraan penataran khatib dan muballigh/muballighah Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari Kotamadya DT II Bandung.

2. Penelitian difokuskan pada tinjauan analisis dari segi sistem pendidikan luar sekolah, yang mencakup komponen-komponen : masukan mentah, masukan sarana, masukan lingkungan, proses, lingkungan lain, keluaran, dan dampak/pengaruh dari penataran tersebut.
3. Penelitian ini difokuskan juga pada tinjauan analisis dari segi manajemen pendidikan luar sekolah, yang mencakup : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan dari penataran tersebut.

D. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan hasil penjajagan di lapangan, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah komponen-komponen penataran khatib dan muballigh / muballighah Majelis Ulama Kelurahan Sarijadi ?
2. Sejauh manakah kesesuaian fungsi manajemen penataran khatib dan muballigh/muballighah dengan fungsi manajemen pendidikan luar sekolah ?
3. Bagaimanakah hasil penataran khatib dan muballigh/ muballighah terhadap para peserta ?
4. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat penerapan sistem dan manajemen pendidikan

luar sekolah dalam penataran khatib dan muballigh/
muballighah Majelis Ulama Indonesia Kelurahan
Sarijadi ?

E. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gambaran pelaksanaan penataran khatib dan muballigh/muballighah ditinjau dari segi sistem dan manajemen pendidikan luar sekolah, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas khatib dan muballigh / muballighah Majelis Ulama Indonesia Kelurahan sarijadi.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendapat gambaran tentang proses pelaksanaan komponen-komponen penataran khatib dan muballigh / muballighah Majelis Ulama Indonesia kelurahan Sarijadi dilaksanakan.
2. Mendapat gambaran tentang kesesuaian komponen-komponen sistem penataran khatib dan muballigh / muballighah dengan komponen-komponen sistem pendidikan luar sekolah.
3. Mendapat gambaran tentang kesesuaian fungsi-fungsi komponen manajemen penataran khatib dan muballigh/muballighah dengan fungsi-fungsi komponen pendidikan luar sekolah.
4. Mengungkapkan dampak dari penataran setelah para

- peserta penataran khatib dan muballigh/muballighah selesai mengikuti penataran, dan terjun ke masyarakat
5. Mengungkapkan data yang menjadi faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat penerapan sistem dan manajemen pendidikan luar sekolah dalam pelaksanaan penataran khatib dan muballigh/muballighah Majelis Ulama Indonesia kelurahan Sarijadi.
 6. Memperoleh asumsi-asumsi baru tentang pelaksanaan penataran dan satuan-satuan pendidikan luar sekolah lainnya, sehingga merupakan masukan bagi penyempurnaan dan kelengkapan Pendidikan Luar Sekolah.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan perbedaan persepsi, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul dan fokus masalah penelitian ini.

1. Penataran adalah salah satu bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah diberikan kepada sekelompok orang dewasa, dengan tujuan untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang yang mereka tekuni. Penataran khatib dan muballigh/muballighah, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan melaksa-

nakan tugas sebagai khatib dan/atau muballigh/muballighah. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan. Berdasarkan PP No. 73 tersebut, baik isinya maupun misinya yaitu tentang keagamaan dan misinya untuk mengisi jabatan tenaga khatib/muballigh, maka jelas bahwa penataran atib dan muballig/muballighah itu merupakan jenis pendidikan luar sekolah.

2. Khatib dan muballigh/muballighah, adalah para pemuka agama (ulama) Islam. Khatib yaitu pemuka agama yang kegiatan sehari-harinya memberikan khutbah kepada jamaah, khususnya pada saat shalat Jumat dan shalat Ied. Muballigh / muballighah berasal dari kata ballagha yang berarti memberi penerangan atau penjelasan. Muballigh/muballighah yaitu pemuka agama yang kegiatan rutinnnya memberikan penerangan/penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan peribadatan maupun yang berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi dan budaya.
3. Majelis Ulama atau Majelis Ulama Indonesia, adalah suatu majelis atau tempat para ulama berhimpun dan

bertukar pikiran, menyusun dan menemukan ide-idenya yang baik dalam rangka membina dan membimbing ummat, sesuai dengan fungsi ulama. Para ulama, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama mempunyai tugas utama untuk melakukan "tafaqquh fid din", dan kemudian memberikan peringatan kepada masyarakat, serta membimbing ummat untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama (K.H. Hasan Basri, 1984 : 8 dan 10).

Majelis Ulama dimaksudkan sebagai suatu organisasi ulama yang menghimpun para khatib dan muballigh/muballighah, yang sedang mengadakan kegiatan penataran bagi sebagian anggotanya.

4. Sistem Pendidikan Luar Sekolah, yaitu suatu himpunan gagasan atau prinsip-prinsip yang saling bertauatan yang terjadi pada suatu kegiatan pendidikan luar sekolah. Sebagaimana paradigma hubungan fungsional antara komponen-komponen pendidikan luar sekolah (D.Sudjana, 1991 ; 32), yaitu meliputi :

- a. Masukan sarana, meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas belajar yang memungkinkan seseorang atau kelompok dapat melakukan kegiatan belajar, seperti : tujuan program penataran, program penataran, penatar atau sumber belajar, fasilitas,

panitia penyelenggara penataran, media belajar, biaya, dan sebagainya.

- b. Masukan mentah, yaitu petatar atau peserta penataran dengan segala karakteristiknya, baik ciri-ciri yang berhubungan dengan faktor internal maupun yang berhubungan dengan faktor eksternal. Yang berhubungan dengan faktor internal, seperti : pengetahuan keagamaan, kemampuan membaca Al-Quran, pengalaman dalam bidang kekhatiban atau kemuballighan, minatnya untuk mengikuti penataran, kebutuhan belajar, dan sebagainya. Sedangkan ciri-ciri yang berhubungan dengan faktor faktor eksternal meliputi status ekonomi, status sosial, keadaan pendidikan, sarana belajar yang dimilikinya, dan kebiasaan belajar.
- c. Masukan lingkungan, yaitu faktor-faktor yang menunjang terlaksananya kegiatan penataran dan terlaksananya mengikuti penataran. Komponen masukan lingkungan ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan kerja, tempat penyelenggaraan penataran, waktu penyelenggaraan penataran, tempat tinggal peserta, tempat tinggal penatar, dukungan tokoh masyarakat, dukungan pemerintah setempat, dan sebagainya.
- d. Proses, yaitu proses belajar membelajarkan dalam

kegiatan penataran. Dalam penelitian ini proses penataran diungkapkan bagaimana penatar membela-jarkan peserta, termasuk penggunaan metoda, teknik pendekatan, strategi, penggunaan sumber belajar, penggunaan media, pemanfaatan lingkungan, dan sebagainya.

- e. Keluaran, yaitu yang dihasilkan dari penataran, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Secara kuantitas dapat ditelusuri dari dokumen-dokumen yang ada. Sedangkan yang menyangkut kualitas lulusan, selain hasil evaluasi panitia, akan terungkap dari penampilan dan penguasaan materi, dan perubahan-perubahan lain dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- f. Masukan lain, yaitu daya dukung lain yang memungkinkan para peserta penataran dan lulusan penataran dapat menggunakan kemampuannya. Untuk ini apakah masyarakat atau jamaah atau DKM menerima dan memberi kesempatan kepada para lulusan penataran untuk memberi ceramah atau tabligh keagamaan atau menjadi khatib di masjid.
- g. Impact (pengaruh), yaitu pengaruh dari ikut sertanya dalam penataran khatib dan muballigh/ muballighah dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, seperti : adanya perubahan penampilan

dan perilaku, perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan keterampilan, kepercayaan masyarakat kepadanya, peransertanya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, dan sebagainya. Dalam kegiatan da'wah atau kemuballighan, apakah ia lebih aktif berperanserta dalam membelajarkan orang lain, dapat mengajak orang lain ke majelis ta'lim, aktivitas ia dalam organisasi keagamaan seperti DKM, MUI, MDI, ICMI, dan sebagainya.

5. Analisis dari segi Sistem Pendidikan Luar Sekolah dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengungkapkan penataran khatib dan muballigh/muballighah secara mendalam dari segi komponen-komponen sistem pendidikan luar sekolah.
6. Analisis dari segi Manajemen pendidikan Luar sekolah, dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tinjauan terhadap kegiatan penataran dari segi fungsi-fungsi manajemen pendidikan luar sekolah. Fungsi-fungsi manajemen PLS ini meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan.
 - a. Perencanaan, menyangkut perencanaan penataran yang meliputi : perumusan tujuan diselenggarakannya penataran, rencana kegiatan penataran, dan rang-

kaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

- b. Pengorganisasian, yaitu mengidentifikasi dan memadukan sumber-sumber yang diperlukan dalam kegiatan penataran. Dalam pengorganisasian ini meliputi : menginventarisasi siapa personal pelaksana kegiatan atau panitia penataran, siapa peserta yang akan diikutsertakan dalam penataran (termasuk persyaratannya), fasilitas apa yang diperlukan, alat-alat apa yang diperlukan, berapa biaya yang diperlukan, dari mana biaya diperoleh, dengan siapa perlu kerjasama, siapa yang perlu dihubungi, dan sebagainya.
- c. Penggerakan, yaitu upaya untuk mewujudkan terlaksanannya penataran mulai dari panitia, peserta dan sumber belajar (penatar). Untuk komponen ini menyangkut fungsi komunikasi antar semua yang terlibat, kepemimpinan panitia dan mewujudkan kerjasama antar seluruh komponen panitia, peserta, penatar, MUI, DKM dan pemerintah setempat.
- d. Pembinaan, menyangkut pengawasan, supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan penataran. Dari komponen ini ingin diketahui siapa yang melaksanakan pembinaan, adakah yang melaksanakan pembinaan, dan bagaimana cara pembinaan yang ditempuh.

- e. Penilaian, meliputi keseluruhan fungsi manajemen dan seluruh komponen, proses, hasil dan pengaruh kegiatan penataran. Dalam penelitian ini diungkap tentang berfungsi atau tidaknya komponen penilaian dalam penataran yang bersangkutan.
 - f. Pengembangan, yaitu merupakan pelaksanaan kembali kegiatan serupa (penataran) melalui fungsi-fungsi manajemen pendidikan luar sekolah. Dalam penelitian ini ingin diungkapkan ada atau tidaknya maksud untuk pengembangan penataran khatib dan muballigh/muballighah di Kelurahan Sarijadi atau di tingkat yang lebih atas, atau mengadakan penataran yang sama dengan materi yang lebih tinggi sebagai lanjutannya.
7. Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan sistem dan manajemen pendidikan luar sekolah.
- a. Faktor-faktor pendorong dimaksudkan dalam penelitian ini ialah semua faktor yang menjadikan penerapan sistem dan manajemen PLS ini mudah dan berhasil dilaksanakan, seperti sambutan dari warga masyarakat, dukungan dari pemerintah setempat, dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat, tersedianya dan kesediaan sumber belajar, kemudahan dana dan fasilitas, dan sebagainya.
 - b. Faktor-faktor penghambat dimaksudkan adalah semua

hal yang menjadi kendala dalam penerapan sistem dan manajemen PLS dalam penataran, seperti : kecurigaan dari pemuka-pemuka masyarakat, ketakutan kehilangan pengaruh karena akan muncul orang lain yang menjadi saingan, terbentur pada biaya, dan lain-lain yang tidak menguntungkan.

6. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penataran khatib dan muballigh/muballighah dengan komponen-komponen Sistem dan Manajemen Pendidikan Luar Sekolah. Dengan demikian penelitian ini memungkinkan akan diperolehnya bahan-bahan untuk menyempurnakan pelaksanaan penataran dan temuan-temuan yang berharga bagi Pendidikan Luar Sekolah. Oleh karena itu secara rinci kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Dari data yang terungkap dalam penelitian ini maka akan berguna untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan penataran yang serupa, sehingga selanjutnya akan terdapat dampak hasil penataran yang sesuai dengan harapan semua pihak, yaitu terpenuhinya kekurangan khatib dan muballigh/muballighah yang bermutu.

Temuan-temuan dari penelitian ini akan merupakan bahan acuan untuk perencanaan program penataran selanjutnya, yang sesuai dengan fungsi-fungsi komponen sistem pendidikan luar sekolah dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan luar sekolah.

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori pendidikan luar sekolah, khususnya teori-teori yang diterapkan dalam pelaksanaan penataran. Hasil penelitian ini paling tidak dapat menambah informasi untuk menguji keterandalan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan Pendidikan Luar sekolah, terutama teori-teori Andragogi, Sistem PLS, Manajemen PLS dan teori-teori pendukung lainnya.

3. Kegunaan Professional

IKIP, sebagai perguruan tinggi yang membina profesi keguruan dan kependidikan, yang di antaranya profesi kependidikan luar sekolah, sangat memerlukan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan profesinya. Oleh karena itu hasil penelitian ini akan menjadi salah satu masukan untuk pengembangan teori-teori dan konsep-konsep pendidikan luar sekolah.

Bagi tenaga pengajar di Perguruan Tinggi, peneli-

tian ini sangat penting untuk menambah wawasan dalam rangka membina profesi pendidikan luar sekolah, khususnya dalam rangka membina mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.



